

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iran merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan terletak di Asia Barat Daya. Mohammad Khatami merupakan presiden ke empat Iran mulai 1997-2005. Pada awal modernisasi banyak pemikiran terkenal tergelila-gila pada budaya Eropa. Namun pada abad 20 Presiden Khatami dari Iran merupakan contoh dari kecenderungan tersebut. Khatami ingin melihat interpretasi yang lebih liberal dari hukum Islam di Iran dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan Barat.¹ Di bawah kepemimpinan Khatami Politik Luar Negeri Iran mempunyai corak baru yang berbeda dengan pendahulunya.

Program kebijakan Khatami yang tidak kalah pentingnya yaitu akan melakukan dialog peradaban dengan bangsa-bangsa luar, termasuk Amerika Serikat. Hal itu dilaksanakan dengan berkunjung ke Barat (Italia dan Vatikan), Khatami beranggapan bahwa jika Iran ingin menuju ke arah perubahan, Iran harus membuka hubungan baik dengan negara adapun dengan tidak saling mencurigai sebagai jalan kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan.²

Setelah lengsernya Mohammad Khatami pada tahun 2005, presiden Iran selanjutnya adalah Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013). Pergantian sosok

¹ Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, Surabaya: 2004, hlm 206.

² KOMPAS, *Iran Membuka Isolasi, Presiden Khatami Berkunjung Ke Barat*. Hlm 4

kepemimpinan dalam suatu negara akan berbeda pula politik luar negeri dengan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad Iran melakukan sosialisasi besar-besaran terhadap negara-negara lain mengenai pentingnya pengembangan teknologi nuklir sebagai sumber energi yang efektif dan efisien yang bermanfaat bagi bangsa Iran. Kebijakan politik luar negeri Iran ini berhasil mengubah masalah ini menjadi simbol perjuangan rakyat Iran menentang hegemoni Barat. Selain itu juga Mahmoud Ahmadinejad aktif mengadakan kunjungan diplomasi ke luar negeri guna mencari dukungan dan mensosialisasikan bahwa program nuklir yang dicanangkan oleh pemerintah Iran itu bertujuan damai bukan sebagai senjata yang membahayakan.

Dalam hubungannya dengan negara-negara Arab, Iran mempunyai hubungan bilateral dengan Yaman yang sudah terjalin sejak tahun 2008. Iran dan Yaman menjalin hubungan diplomatik di bidang ekonomi sehingga volume perdagangan kedua negara tersebut mencapai sekitar \$ 6 juta-\$ 9 juta dolar Amerika. Pada bulan Mei hubungan kedua negara semakin dekat dan memperluas hubungan antara kedua negara. Iran dan Yaman juga meningkatkan hubungan bilateral dengan mengadakan komite 8 menteri untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Yaman-Iran. Kerjasama kedua negara menyangkut ekonomi, bidang akademis, sains, dan budaya.³

Kemudian pada tahun 2013 Iran mempunyai presiden baru yakni Hassan Rouhani. Dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani Iran memfokuskan politik luar negerinya dalam meredakan ketegangan yang menyelimuti masalah program nuklir

³ <http://thesis.ums.ac.id/datapublik/t17933.pdf> diakses pada tanggal 6 Oktober 2015.

Iran dengan negara-negara Barat. Dengan adanya kesepakatan nuklir pada akhir tahun 2013, maka secara otomatis Iran mendapatkan pengakuan internasional atas hak pengayaan uraniumnya. Sehingga hal tersebut Iran mendapat kepercayaan kembali dari dunia internasional. Perjalanan panjang politik luar negeri Iran setelah revolusi telah memberikan banyak perubahan di berbagai bidang baik itu dalam konteks domestik, regional dan bagi hubungan internasionalnya

Hubungan bilateral Iran dengan Yaman yang sudah terjalin pada tahun 2008 tidak berlangsung lama. Pada tahun 2015 hubungan bilateral Yaman-Iran mencapai titik yang kurang baik. Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi di Yaman dukungan Arab Saudi mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.⁴ Mansour Hadi mengatakan bahwa memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dikarenakan Iran telah mencampuri urusan internal Yaman dan pelanggaran kedaulatan.

Konflik internal yang terjadi di Yaman adalah konflik bersenjata dari salah satu kelompok yakni Al-Houthi. Konflik ini berawal dari dampak gelombang *Arab Spring* yang terjadi pada Desember 2010 di Tunisia yang bermula dari ketidakpuasan warga negara-negara Arab terhadap pemerintah mereka. Pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam menegakkan peraturan. Sehingga keadaan yang menyengsarakan warga negara Arab memunculkan dorongan rakyat untuk mulai berusaha menggulingkan pemerintah yang berkuasa dan menuntut adanya

⁴ <http://news.liputan6.com/read/2332110/yaman-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-iran> di akses pada tanggal 2 November 2015 pukul 17.30 WIB.

pemerintahan baru. Seiring dengan pesatnya perpindahan informasi dan budaya revolusioner di kalangan masyarakat, maka gejolak *Arab Spring* ini menyebar ke negara-negara sekitarnya. Gelombang protes yang pertama kali pecah di Tunisia pada Desember 2010 ini, kemudian menyebar ke negara Arab lainnya termasuk Yaman.⁵

Saat ini Yaman bisa dikatakan sebagai ironi dari Dunia Arab. Salah satu buktinya adalah di saat negara-negara tetangganya bisa hidup makmur karena limpahan kekayaan minyak, Yaman justru menjadi salah satu negara yang paling miskin di kawasan Arab. Kemiskinan Yaman tersebut tentunya tidak lepas dari maraknya kegiatan korupsi di sana serta minimnya cadangan minyak yang ada di wilayah Yaman tersebut dan diiringi dengan konflik bersenjata dari salah satu kelompok yang aktif dalam konflik di Yaman yakni Al-Houthi.

Pada tahun 2011 gelombang protes mencapai Yaman, di negara ini revolusi protes berlangsung dalam rangka menggulingkan rezim Yaman saat itu dan menuntut turunnya Presiden Ali Abdullah yakni Presiden pertama Yaman sejak tahun 1994. Terlebih kepemimpinan Ali Abdullah Saleh saat itu dinilai tidak cukup mensejahterakan rakyatnya, sehingga menjadi alasan pemberontak untuk menggulingkannya. Banyaknya protes yang terjadi pada saat itu menimbulkan banyak korban jiwa, sehingga pada tahun 2012 Presiden Ali Abdullah Saleh resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah digoyang demonstrasi besar-besaran anti Ali Abdullah Saleh.

⁵ <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini> diakses pada tanggal 28 Maret 2015.

Ketidakstabilan politik di Yaman yang terjadi selama upaya penggulingan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang mengakibatkan warga Yaman menuntut adanya pergantian rezim. Pihak oposisi kemudian menunjuk Wakil Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi untuk menggantikannya. Ketika Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi telah resmi menjadi Presiden Yaman, keadaan Yaman semakin memanas dengan memuncaknya konflik Sektarian Syi'ah yang diwakili oleh Kelompok Houthi dengan kaum Sunni yang berada di pihak Pemerintah Yaman. Kekuatan pemberontak Syi'ah Al-Houthi pun meningkat drastis sejak Oktober 2013. Kemudian pada 17 September 2014 pertempuran terjadi antara pasukan Pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi yang berlangsung di tepi ibu kota Sana'a yang mengakibatkan kerusakan parah.⁶ Selain bermusuhan dengan Yaman, Al-Houthi juga bermusuhan dengan Arab Saudi dan kelompok ekstrimis internasional Al-Qaeda.

Dengan adanya aksi tersebut, maka Presiden Hadi meminta dukungan dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk guna memperbaiki keadaan di Yaman. Arab Saudi yang menyanggupi permintaan Presiden Hadi kemudian melakukan penyerangan terhadap Yaman melalui serangan udara untuk menyerang kelompok Houthi. Melihat Arab Saudi bergerak melakukan penyerangan terhadap kelompok pemberontak Houthi, maka kelompok pemberontak Houthi kemudian meminta bantuan negara Iran sebagai upaya perlawanan dari kelompok Houthi untuk melakukan penyerangan terhadap Arab Saudi. Iran pun menyanggupi permintaan dari

⁶<http://www.al-intima.com/akhbar-dauliyah/konflik-yaman-konflik-arab-saudi-iran> diakses pada tanggal 21 April 2015.

kelompok Houthi. Iran tentunya memiliki maksud dibalik bantuan yang diberikannya kepada houthi. Keterlibatan pasukan revolusi Iran dalam membantu pemberontak Syi'ah Houthi di Yaman terlihat dari bantuan yang diberikan Iran secara tidak langsung yakni adanya kapal Iran yang menyuplai senjata ke Syi'ah Houthi.⁷

Selain itu, pihak Wakil Gubernur Aden dan Ketua Dewan Perlawanan Populer, Nayef Al-Bakri juga telah menangkap pasukan revolusi Iran yakni pemimpin tentara dan perwira tinggi Iran yang diyakini telah membantu pemberontak Syi'ah Houthi.⁸ Seorang pejabat tinggi militer Iran yakni Jenderal Ali Hadmani juga mengakui bahwa negaranya ikut membantu pemberontak Syi'ah Houthi dan sekutunya dalam menghadapi agresi militer Koalisi Negara Islam yang dipimpin Saudi dan sekutunya di Yaman dengan menjadi penasihat militer dan memberikan sejumlah bantuan kepada mereka. Hadirnya Iran terhadap konflik yang terjadi di Yaman ini kemudian memunculkan pertanyaan di benak banyak pihak terkait dengan kondisi di Yaman saat ini, karena campur tangan Iran tidak akan masuk ke Yaman seandainya tidak terdapat faktor pendukung utamanya yakni gerakan Houthi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

⁷<https://www.islampos.com/alumni-universitas-andalush-peran-iran-terhadap-Syi'ah-houthi-di-yaman-sangat-besar-187442/> diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

⁸<http://www.suara-islam.com/read/index/14123/Terungkap--Pasukan-Revolusi-Iran-Bantu-Pemberontak-Syi'ah-Houthi-di-Aden> diakses pada tanggal 4 Mei 2015.

“Mengapa Iran membantu kelompok Houthi dalam konflik di Yaman pada tahun 2015?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa rumusan masalah yang muncul, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, teori intervensi, dan *sphere of influence*.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan negara lain. Tokoh yang menjelaskan konsep kepentingan nasional pertama kali yaitu Hans Morgenthau dengan pendekatan realisnya. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang ditulis oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M Yani bahwa para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

“Kepentingan nasional sebagai upaya suatu negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan

dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional”.⁹

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”.¹⁰

Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Terkait dengan keterlibatan Iran dalam membantu kelompok Houthi, prioritas utama politik luar negeri Iran yang ingin dicapainya adalah menjaga stabilitas kawasan di Timur Tengah. Bagi Iran stabilitas kawasan merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan bagi kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, Iran memiliki perhatian yang cukup besar terhadap konflik yang terjadi di Yaman dengan membantu kelompok Houthi.

⁹ Perwita, Anak Agung B. & Yani, Yanyan M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Edisi kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal 35.

¹⁰ T.May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116.

2. Konsep Intervensi

Menurut ketentuan Piagam PBB Pasal 1 ayat (1), intervensi terjadi jika negara lain mengalami tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam kedamaian dan keamanan internasional suatu negara. Intervensi menurut K.J Holsti adalah tindakan radikal terhadap negara lain tanpa adanya izin dari pemerintah yang berkuasa melalui tindakan yang dapat berupa campur tangan diplomatik, memamerkan kekuatan, pemberontakan atau subversi perang gerilya serta penggunaan kekuatan militer. Campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat adalah norma dasar dari hukum internasional. Intervensi mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negara lain yang berdaulat.¹¹

Sementara itu Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa Intervensi juga terjadi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut. Dampak intervensi adalah perubahan situasi politik, pendapat publik, kebijakan baru hingga pada skala tumbangnya rezim penguasa setempat. Pada dasarnya intervensi merupakan representasi dari pembentukan aturan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah daripada aturan hukum.

¹¹ [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal_4_September_2014_\(Baru\)_09-11-14-08-13-13\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal_4_September_2014_(Baru)_09-11-14-08-13-13).pdf)

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, intervensi yang dilakukan suatu negara dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu¹² :

1. Diundang oleh penguasa

Biasanya hal ini terjadi manakala penguasa setempat tidak mampu menangani pemberontak yang terus menimbulkan korban jiwa. Biasanya ini dilakukan oleh negara yang kekuatan nasionalnya lemah.

Dalam hal ini Iran tidak di undang oleh penguasa setempat (Yaman). Akan tetapi negara yang di undang oleh penguasa setempat yakni negara Arab Saudi. Arab Saudi bersama koalisi Arab menyerang Yaman dengan tujuan untuk melawan kelompok Al Houthi.

2. Diundang oleh kelompok oposisi

Adanya kelompok masyarakat yang aspirasinya tidak didengarkan oleh pemerintah. Hal ini dapat berimbang kepada perpecahan konflik yang terjadi diwilayah tersebut. Dalam perpecahan konflik tersebut menimbulkan adanya kelompok-kelompok sosial yang mempunyai tujuan politik yang keras yakni untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kecenderungan ini menimbulkan bantuan dari pihak eksternal baik berupa dana, propaganda, latihan militer, persenjataan militer dan perlindungan untuk kelompok sosial tersebut.

¹² Jack C Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston Inc, 1969, hal 62.

Dalam hal ini keterlibatan Iran dalam membantu kelompok Houthi kenyataannya lebih kepada diundang oleh kelompok oposisi dikarenakan Iran yang mempunyai kesamaan ideologi dengan kelompok Houthi. Terlihat dari sikap Iran yang memberikan beberapa bantuan kepada kelompok Houthi seperti bantuan senjata, latihan militer yang dilakukan oleh pemerintah Iran kepada kelompok Houthi, dan kapal perang ke Teluk Aden untuk membantu kelompok Houthi dalam melawan pimpinan koalisi Arab yaitu Arab Saudi.

3. Sebagai tamu tak diundang

Pelaku intervensi tentunya memiliki tujuan. Apabila pelaku intervensi ini berhasil menyukseskan salah satu pihak yang berkonflik dalam menduduki kursi kekuasaan maka pengaruh pelaku intervensi itu akan selalu melekat pada kursi kekuasaan sehingga hal ini dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kepentingan nasional dari pelaku intervensi tersebut.

Dalam kasus ini, Iran bukanlah negara yang tidak diundang dan tidak diminta untuk terlibat dalam konflik di Yaman, melainkan Iran adalah negara atau tamu yang sengaja diundang dan diminta oleh kelompok oposisi untuk datang ke Yaman. Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar konflik kesukuan, keagamaan, ekonomi maupun ideologi dalam suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula kemungkinan peluang suatu pemerintahan luar akan melakukan intervensi yang bertujuan untuk meraih kepentingan dalam negara tersebut.

3. *Sphere of Influence* (Wilayah Pengaruh)

Jack C. Plano mengartikan bahwa *influence* (pengaruh) yakni sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku aktor lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. *Sphere of Influence* (wilayah pengaruh) diartikan sebagai suatu wilayah yang terdiri dari negara-negara kecil atau lemah yang dikuasai oleh sebuah negara yang lebih besar atau kuat yang berdekatan letaknya, memiliki sumber alam sehingga muncul keinginan untuk memperluas pengaruhnya demi kepentingan negara sendiri.¹³

Penggunaan pengaruh yang berhasil, dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau mencegah perubahan yang diinginkan oleh pelaku. Sebuah lingkup pengaruh biasanya diklaim oleh bangsa imperialistik atas suatu negara terbelakang atau lemah yang berbatasan sebuah koloni yang telah ada. Kemampuan pelaku untuk mempengaruhi aktor lain tergantung pada banyak faktor, diantaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atau dasar wewenang dan pengaruh, kualitatif kompetitif dan pihak lain yang juga sedang melancarkan pengaruh, dan derajat tuntutan penyesuaian.

Jack C. Plano juga menjelaskan bahwa dalam sebuah wilayah pengaruh (*sphere of influence*) kekuatan besar memang tidak memiliki kedaulatan formal atas negara-negara yang ada dalam wilayah pengaruhnya. Tetapi aktor besar tersebut

¹³ Cathal J. Nolan, *The Longman Guide to World Affairs*, Longman Publishers, New York: 1995.

dalam kenyataannya mampu “memaksa” pihak lain untuk menerima sebuah ketaatan tingkah laku politik sesuai dengan kepentingan negara besar tersebut.¹⁴

Dalam kaitannya dengan keterlibatan Iran dalam konflik di Yaman ini yakni Iran sebagai negara yang besar selain Arab Saudi di Timur Tengah ingin memperluas pengaruh hegemoninya demi kepentingan negaranya sendiri. Dengan adanya pengaruh tersebut maka Iran akan lebih mudah menguasai Yaman dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesa atau dugaan sementara bahwa alasan Iran membantu kelompok Houthi dalam konflik di Yaman pada tahun 2015 yakni :

1. Untuk meningkatkan pengaruh politik di kawasan Timur Tengah serta berkeinginan untuk memperluas pengaruhnya di Yaman dan menekan kekuatan pengaruh Arab Saudi di kawasan regional.
2. Untuk menjaga kepentingan strategis wilayah Yaman.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis serta membuktikan hipotesa.

¹⁴ Jack Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Third Edition (England ; Clio Press Ltd, 1982)

2. Untuk mengetahui alasan Iran melakukan intervensi dalam konflik di Yaman serta bantuan Iran kepada kelompok Al-Houthi.
3. Untuk mengetahui penyebab konflik Al-Houthi dengan pemerintahan Mansour Hadi.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan pencapaiannya lebih spesifik, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah sejak adanya dampak dari gelombang *Arab Spring* yang terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2015 sebagai eskalasi konflik.

Penulis mungkin akan sedikit menyinggung masalah diluar tahun tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data

Dengan berdasarkan kerangka pemikiran kemudian akan ditarik hipotesa yang dibuktikan dengan beberapa data. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analitik, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan serta menganalisa data yang ada. Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, melalui teknik ini data diambil dari berbagai sumber seperti buku, berita, jurnal-jurnal di internet, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I yakni pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penulisan dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah membahas mengenai dinamika kebijakan Iran di Timur Tengah pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad dan Hassan Rouhani.

BAB III yakni membahas tentang dasar-dasar politik luar negeri Iran dan latar belakang kemunculan gerakan Al-Houthi serta keterlibatan negara Arab Saudi dan Iran dalam konflik di Yaman.

BAB IV menjelaskan mengenai alasan-alasan Iran dalam membantu dan mendukung kelompok Al-Houthi dalam konflik yang terjadi di Yaman melawan pemerintah Yaman pada tahun 2015.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan disertai daftar pustaka.